

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA  
DINAS PERIKANAN  
TRIWULAN I TAHUN 2019**



**Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Alamat : Jalan Melati Nomor 14 Kandangan 71211, Telpon/Fax (0517) 21094**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami mampu menyusun dan menyampaikan Laporan Realiasi Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019. Kami menyadari capaian realisasi triwulan I ini belum memuaskan karena indikator kinerja utama belum dapat direalisasikan sesuai yang diharapkan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang aktivitas dan kinerja Dinas Perikanan selama 1 triwulan, walaupun dengan capaian kinerja triwulan I yang belum begitu baik. Kami berharap laporan capaian kinerja ini dapat memotivasi kinerja kami untuk lebih baik lagi pada triwulan berikutnya.

Demikain laporan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Kandangan, 1 April 2019

**Kepala Dinas,**



**Ir. H. SAIDINOOR**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641215 199312 1 002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD .....	2
1.3. Isu Strategis .....	3
1.4. Landasan Hukum .....	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
2.1. Perencanaan Strategis .....	7
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	9
2.3. Perjanjian Kinerja .....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	13
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	13
3.2. Pengukuran .....	13
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	14
3.4. Akuntabilitas Keuangan .....	21
3.5. Prestasi/Penghargaan.....	22
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	23

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan 2018-2023.....	8
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	9
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perikanan.....	11
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2019 .....	13
Tabel 3.2. Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran.....	13
Tabel 3.3 Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	14
Tabel 3.4 Data Produksi Perikanan Triwulan I Tahun 2019 .....	15
Tabel 3.5 Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	17
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perikanan.....	18
Tabel 3.7. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Dinas Perikanan .....	21

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perikanan sebagai Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan penyampaian akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam penetapan Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2019 merupakan tahun pertama penjabaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2019 ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perikanan pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perikanan pada Triwulan I dalam satu tahun anggaran kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang di Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## 1.2. Tugas dan Fungsi SKPD

Pembentukan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Dinas Perikanan Kab. HSS) didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Dinas Perikanan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. menetapkan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan dan Pemasaran Perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menetapkan program kerja Dinas Perikanan sesuai dengan kebijakan teknis dinas;
3. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Perikanan Budidaya;
4. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Perikanan Tangkap;
5. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan;
6. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan dan Pemasaran Perikanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perikanan budidaya;

3. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang perikanan tangkap;
4. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang pengolahan dan pemasaran perikanan;
5. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan UPTD;
6. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Sesuai peraturan Bupati tersebut Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang dan 1 (satu) UPTD.

Struktur organisasi Dinas Perikanan Kab. HSS terdiri atas :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat Dinas
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Perencanaan;
  - Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perikanan Budidaya
  - Seksi Budidaya dan Kesehatan Ikan;
  - Seksi Sarana Prasarana dan Teknologi Budidaya.
4. Bidang Perikanan Tangkap
  - Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum;
  - Seksi Sarana Prasarana Penangkapan dan Pemberdayaan Nelayan
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan
  - Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan
  - Seksi Pemasaran dan Investasi Perikanan
6. UPTD Lingkup Dinas
  - UPTD Balai Benih Ikan (BBI)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

### **1.3. Isu Strategis**

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Permintaan produk perikanan yang masih terbuka luas dan terus meningkat.

Berdasarkan data statistik tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 229.889 jiwa, sementara jumlah produksi perikanan tangkap sebanyak 8.225,40 ton dan jumlah perikanan budidaya sebanyak 4.090,4 ton. Potensi pengembangan

budidaya air tawar dengan luasan 7.215,044 Hektar dan potensi penangkapan ikan yang sangat besar dengan luasan perairan umum sebesar 80.790 Hektar.

2. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pelaku usaha hasil perikanan. Berdasarkan data statistik perikanan Tahun 2016 bahwa jumlah nelayan 17.735 orang dan jumlah pembudidaya ikan 1.805 orang. Sementara jumlah pengolah hasil perikanan sebanyak 27 kelompok dan jumlah pemasar hasil perikanan 186 orang.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya.
4. Rendahnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Dari data kepegawaian di Dinas Perikanan, masih terdapat kekurangan pegawai pada beberapa jabatan fungsional umum. Jumlah persoil belum seimbang dengan beban tugas Dinas

#### **1.4. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan laporan ini mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/Permen-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/Permen-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang didalam perencanaan strategis tersebut terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

#### 1). Tujuan dan sasaran

##### a. Tujuan

1. Meningkatkan persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

##### b. Sasaran

1. Meningkatnya persentase pertumbuhan sektor perikanan dalam PDRB
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

#### 2). Strategi dan Kebijakan

##### a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kab. HSS dalam mengaktualisasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif.

##### b. Kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kab. HSS.

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perikanan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah dan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan 2018-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2018)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)
								2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	9,07	Meningkatnya persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	%	-	5,46	6,56	8,64	8,9	9,07	9,07
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Predikat/Nilai AKIP	Nilai	BB	A	A	A	A	A	A

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, IKU Dinas Perikanan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi/Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	Sesuai dengan potensi penangkapan ikan yang sangat besar dengan luasan perairan umum 80.790 Ha dan potensi pengembangan budidaya air tawar dengan luasan 7.215,044 Ha	$\frac{\sum \text{Nilai sub sektor perikanan dalam PDRB tahun } N - \sum \text{Nilai sub sektor perikanan dalam PDRB Tahun } (N-1)}{\sum \text{Nilai sub sektor perikanan dalam PDRB Tahun } (N-1)} \times 100\%$	Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Perikanan Tangkap	Data Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Perikanan Tangkap
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Sebagai salah satu hasil akuntabilitas kinerja OPD	<b>Hasil evaluasi internal dari Inspektorat</b>	Sekretariat	Data semua bidang

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan.

Secara berjenjang semua Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membuat dan menandatangani perjanjian kinerja tahun 2019. Kepala Dinas Perikanan (Pejabat Tinggi Pratama) telah membuat dan menandatangani perjanjian kinerja dengan Bupati Hulu Sungai Selatan, demikian juga halnya dengan para pejabat struktural eselon III (Pejabat Administrator) telah membuat dan menandatangani perjanjian kinerja dengan Kepala Dinas Perikanan. Sedangkan untuk pejabat struktural eselon IV (Pejabat Pengawas) telah

membuat dan menandatangani perjanjian kinerja dengan atasannya masing-masing.

Untuk para Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat dengan Sekretaris dan untuk Kepala Sub Bidang dengan Kepala Bidang nya masing-masing.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pejabat Tinggi Pratama Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	%	5,46	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan bibit ikan unggul	103.150.000
						Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan	178.295.000
						Budidaya Ikan Air Tawar	335.200.000
						Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	14.625.000
						Pelatihan Budidaya Perikanan	25.860.000
					Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	19.854.000
						Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	273.590.000
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	324.950.000
					Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	8.250.000
						Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	7.750.000
						Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	11.900.000
					Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan Pelaku Agribisnis Perikanan	16.551.600

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	A	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa dan Administrasi Kantor	39.680.350
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.820.000
						Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	14.000.000
						Penyediaan Makanan dan Minuman	24.975.000
						Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	160.450.000
						Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	310.607.650
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	82.520.745
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	92.456.000
						Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	103.400.000
					Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Keuangan	4.875.000
						Penyusunan Dokumen AKIP	4.875.000
					Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	88.084.100





### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Hasil capaian indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019	TRIWULAN I		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5		6
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	%	5,46	-	0	0

#### 3.2 Pengukuran

Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada organisasi. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana organisasi memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.

Pengukuran kinerja mempunyai tujuan pokok yaitu untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

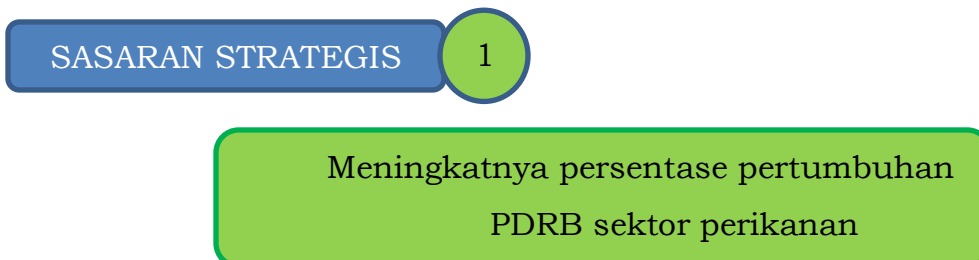
Pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama dan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan. Adapun hasil perhitungan pengukuran indikator kinerja sasaran sampai dengan triwulan I sebagai berikut :

Tabel 3.2. Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PRRHITUNGAN INDIKATOR	FORMULASI
1	2	3	4
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	(Jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun N – Jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun (N-1)/Jumlah nilai sektor perikanan dalam PDRB tahun (N-1) x 100 %	-
2	Nilai/Predikat AKIP	Hasil evaluasi internal dari Inspektorat	-

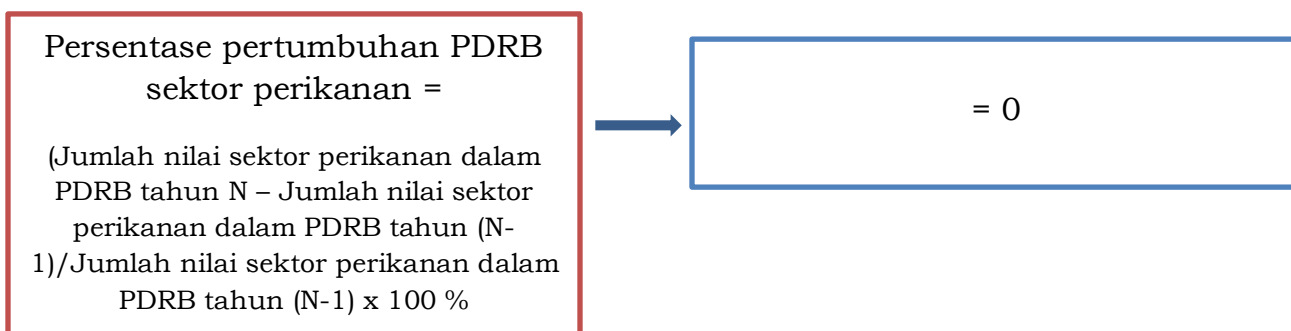
### 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dari uraian capaian hasil kinerja sesuai indikator kinerja utama tersebut diatas, dapat dievaluasi dan dianalisis sebagai berikut :



Tabel 3.3. Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	%	5,46	0	0	Belum Tercapai (belum dilakukan penghitungan)



**Pencapaian sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan.**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Pengertian PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Pendekatan

produksi yaitu Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

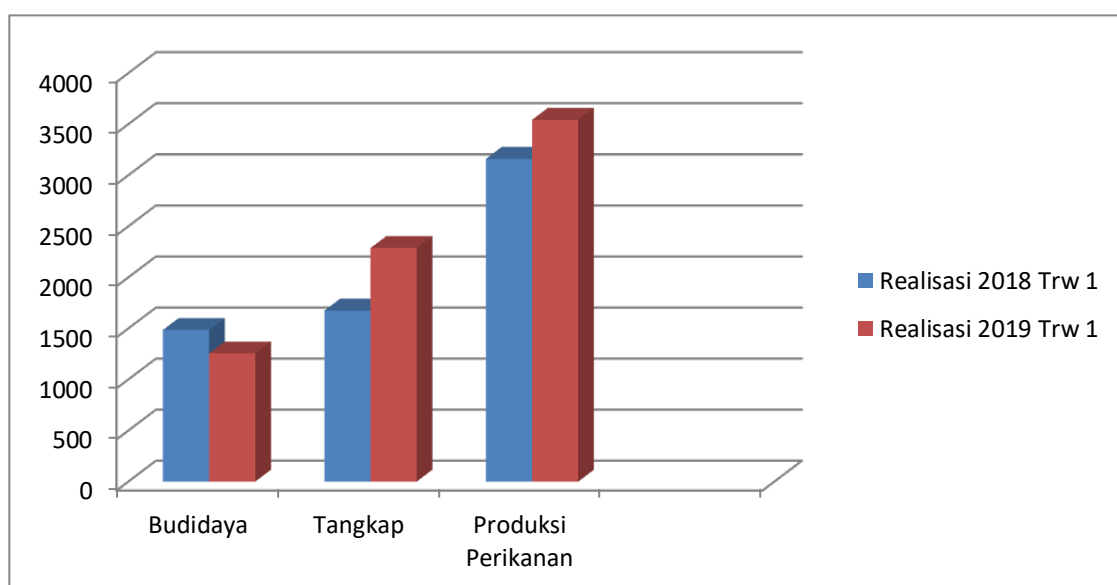
Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan sampai dengan triwulan I ini masih belum dilakukan penghitungan dari target Tahun 2019 sebesar 5,46%.

Adapun hasil produksi perikanan pada Triwulan I ini sebagai berikut :

Tabel 3.4. Data Produksi Perikanan Triwulan I Tahun 2019

NO	Produksi	Realisasi 2018 Trw 1	Produksi 2019 Trw 1		Persentase
			Target	Realisasi	
1	Produksi Budidaya	1.485,14	1.197,75	1.254,89	35,42
2	Produksi Tangkap	1.674,75	2.107,38	2.287,70	64,58
	<b>Jumlah Produksi</b>	3.159,89	3.305,13	3.542,59	100,00

Grafik 3.1. Produksi Perikanan Triwulan 1 Tahun 2019



Faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai sasaran ini adalah :

- Hal ini terjadi karena pada triwulan I yaitu bulan Januari-Maret belum musim ikan, perairan didominasi oleh anak-anak ikan yang dilarang untuk ditangkap. Ikan yang bisa ditangkap hanya ikan sisa kemarau yang telah selesai memijah. Sementara petani pembudidaya ikan aktif melakukan budidaya. Berdasarkan data produksi budidaya 2018 Triwulan 1 dibanding dengan produksi budidaya 2019 Triwulan 1 terdapat penurunan produksi karena pembudidaya ikan menunda penebaran benih agar dapat dipanen pada bulan puasa (bulan Mei/Juni).
- Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I ini diantaranya kegiatan pembinaan terhadap pembudidaya ikan yaitu pada Pokdakan Sungai Kajang di Desa Bangkau tanggal 31 Januari 2019, Pokdakan Tani Makmur Desa Jelatang Kecamatan Padang Batung tanggal 25 Maret 2019 dan Pokdakan Berkat Sadar Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 28 Maret 2019. Sementara pembinaan pada nelayan perikanan tangkap dilaksanakan pada KUB Papadaan Sungai Kupang tanggal 14 Maret, KUB Kasturi Desa Penjampang Bahagia tanggal 18 Maret dan KUB Berkat Mufakat Desa Pihanin pada tanggal 29 Maret. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan kelestarian perikanan tangkap berupa patroli/razia sebanyak 3 (tiga) kali yakni bulan Januari, razia anak ikan di Pasar Kandangan, razia bulan Februari di Desa Balimau Kecamatan Kalumpang dan razia bulan Maret di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara. Pelaku *illegal fishing* yang tertangkap pada kegiatan razia pada bulan Januari sebanyak 1 orang di Desa Samuda. Kasus yang ditangani atas kerjasama Dinas Perikanan dengan Polsek Daha Utara dan Pokmaswas Sakinah Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan.
- Produksi benih pada triwulan I sebesar 210.500 ekor dengan jumlah pendapatan sebanyak Rp. 20.000.000.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah :

- Melakukan pembinaan terhadap nelayan dan kelompok pembudidaya ikan.
- Melakukan koordinasi lintas sektoral dengan pihak terkait.

- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan perikanan.
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan.

## SASARAN STRATEGIS

2

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Tabel 3.5. Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	A	0	0%	Belum tercapai

**Pencapaian sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.**

Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD menjadi indikator yang cukup menentukan terhadap kualitas kinerja SKPD, karena semakin baik nilai evaluasi AKIP SKPD menunjukkan bahwa pola manajemen dalam suatu organisasi telah berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dimana seluruh unsur tersebut menentukan tingkat keberhasilan SKPD dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi AKIP SKPD setiap tahunnya dilaksanakan oleh Inspektorat Kab.HSS Target nilai evaluasi AKIP pada Dinas Perikanan yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah kategori BB. Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat, Dinas Perikanan memperoleh nilai 80,55 atau kategori A. Nilai AKIP ini mengalami kenaikan bila dibanding evaluasi tahun 2017 yang memperoleh nilai 71,69 atau kategori BB. Sementara untuk tahun 2019 belum dilakukan evaluasi.

Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya nilai evaluasi AKIP akan terus meningkat sehingga dapat menunjang nilai evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memperoleh nilai A.

Data kinerja tersaji dalam tabel berikut ini :

Grafik 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2



Rincian alokasi dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perikanan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan bibit ikan unggul	103.150.000	0
				Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan	178.295.000	0
				Budidaya Ikan Air Tawar	335.200.000	0
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	14.625.000	0
				Pelatihan Budidaya Perikanan	25.860.000	0
			Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	19.854.000	0
				Pengawasan dan Kelestarian Perikanan Tangkap	273.590.000	25.290.000
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap	324.950.000	0

1	Meningkatnya persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	8.250.000	0
				Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	7.750.000	0
				Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	11.900.000	0
			Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan Pelaku Agribisnis Perikanan	16.551.600	429.600
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Predikat/Nilai AKIP	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa dan Administrasi Kantor	39.680.350	4.258.375
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.820.000	6.329.679
				Penyebarnya Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	14.000.000	0
				Penyediaan Makanan dan Minuman	24.975.000	900.000
				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	160.450.000	31.750.000
				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	310.607.650	26.721.000
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	82.520.745	19.337.745
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	92.456.000	8.348.139
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	103.400.000	0
			Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Keuangan	4.875.000	1.700.000
				Penyusunan Dokumen AKIP	4.875.000	1.750.000
			Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	88.084.100	314.600



## Dokumentasi Kegiatan Pendukung

### - Kegiatan Bidang Perikanan Budidaya



### - Kegiatan Bidang Perikanan Tangkap



### 3.4. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan data realisasi keuangan yang ada pada Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Triwulan I Tahun Anggaran 2019 dapat dilaporkan sebagai berikut :

Tabel 3.7. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Dinas Perikanan

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
<b>1</b>	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:			
	1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor,	39.680.350,00	4.258.375	10,73
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.820.000,00	6.329.679,00	19,29
	3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	14.000.000,00	0,00	0
	4. Penyediaan makanan dan minuman	24.975.000,00	900.000,00	3,60
	5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran,	160.450.000,00	31.750.000,00	19,79
	6. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan Lapangan	310.607.650,00	26.721.000,00	8,60
<b>2.</b>	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	82.520.745,00	19.337.745,00	23,43
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	92.456.000,00	8.348.139,00	9,03
	3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	103.400.000,00	0	0
<b>3.</b>	Program peningkatan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
	1. Penyusunan dokumen keuangan	4.875.000,00	1.700.000,00	34,87
	2. Penyusunan Dokumen AKIP	4.875.000,00	1.750.000,00	35,90
<b>4</b>	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah			
	1. Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	88.084.100,00	314.600,00	0,36
<b>5</b>	Program peningkatan produksi perikanan budidaya			
	1. Pengembangan bibit kan unggul	103.150.000,0	0	0
	2. Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan	178.295.000,00	0	0
	3. Budidaya Ikan Air Tawar	335.200.000,00	0	0
	4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	14.625.000,00	0	0
	5. Pelatihan Budidaya Perikanan	25.860.000,00	0	0

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
6.	Program peningkatan produksi perikanan tangkap			
	1. Pemberdayaan kelompok nelayan perikanan tangkap	19.854.000,00	0	0
	2. Pengawasan dan kelestarian perikanan tangkap	273.590.000,00	25.290.000,00	9,24
	3. Penyediaan Sarana dan Prasarana nelayan perikanan tangkap	324.950.000,00	0	0
7.	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
	1. Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	8.250.000,00	0	0
	2. Pemasaran dan Investasi Hasil Perikanan	7.750.000,00	0	0
	3. Peningkatan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan	11.900.000,00	0	0
8.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan			
	1. Pelatihan Petani Ikan/Nelayan dan Pelaku Agribisnis Perikanan	16.551.600,00	429.600,00	2,60
<b>JUMLAH</b>		<b>2.278.719.445,00</b>	<b>127.129.138,00</b>	<b>5,58</b>

Nilai realisasi anggaran ini lebih rendah dibanding realisasi Triwulan I Tahun 2018 yaitu Rp. 483.288.636,00 atau 16,58 %. Hal ini terjadi karena kegiatan Budidaya Ikan Air Tawar dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Nelayan Perikanan Tangkap belum bisa dilaksanakan akibat perubahan lokasi.

### 3.5. Prestasi/Penghargaan

Prestasi yang diraih oleh Dinas Perikanan pada Triwulan I Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KEJUARAAN/KEGIATAN	TINGKAT	PRESTASI
1	-	-	-

## **BAB IV. PENUTUP**

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka pada triwulan I tahun 2019 belum semua indikator kinerja dapat direalisasikan, karena belum semua kegiatan dapat dilaksanakan di triwulan I. Adapun realisasi capaian per indikator kinerja sasaran adalah :

1. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan masih 0%. Perhitungan persentase pertumbuhan PDRB biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai 0% diperoleh karena belum dilakukan penghitungan persentase pertumbuhan PDRB. Sementara produksi perikanan pada triwulan I sebesar 3.542,59 Ton dari target produksi perikanan triwulan I tahun 2019 yang telah ditetapkan sebesar 3.305,13 Ton.
2. Predikat/nilai AKIP belum ada. Belum dilakukan evaluasi untuk Tahun 2019. Sementara nilai evaluasi AKIP Tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 80,55 atau kategori A.

Untuk realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar 127.129.138 atau 5,58%.